
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Syifa Silvana Puspita Rahayu¹, Al Qaromah Desidin², Reina Apriliani³, Meta
Hendrayani⁴, Ahmad Hamdan⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵ Universitas Siliwangi

Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

¹ syifaslva@gmail.com, ² alqaromah83@gmail.com, ³ rei.apriliani@gmail.com,
⁴ metahendrayani33@gmail.com, ⁵ ahmad.hamdan@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Family Welfare Empowerment Program (PKK) in Kahuripan Village using a qualitative descriptive approach. This study identified the inhibiting and supporting factors for the program, especially related to limited funding from the government despite the large population in the kelurahan. Methods of data collection in this study using interview techniques, observation, and documentation. It was found that the PKK program in Kahuripan District had been running well with routine activities such as recitation, health education, and family economic empowerment. However, there are still obstacles in the implementation of the program, especially related to the limited funds provided by the government. Nonetheless, the Kahuripan community has shown significant participation in supporting the PKK program through voluntary contributions of ideas and labour. To improve the PKK program, government support is needed in providing sufficient and equitable funds according to the needs of densely populated urban villages. Therefore, this research is expected to provide an in-depth understanding of the implementation of the PKK program in Kahuripan Village and provide recommendations for program improvement.

Keywords: Family Welfare, Health Counseling, Community Participation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Kahuripan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung program, terutama terkait keterbatasan dana dari pemerintah meskipun jumlah penduduk di kelurahan tersebut besar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya program PKK di Kelurahan Kahuripan sudah berjalan baik dengan kegiatan rutin seperti pengajian, penyuluhan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun demikian, masyarakat Kahuripan telah menunjukkan partisipasi yang signifikan dalam mendukung program PKK melalui sumbangan ide dan tenaga secara sukarela. Untuk meningkatkan program PKK, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan dana yang cukup dan merata sesuai kebutuhan kelurahan yang padat penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan program PKK di Kelurahan Kahuripan dan memberikan rekomendasi perbaikan program.

Kata Kunci: Kesejahteraan Keluarga, Penyuluhan Kesehatan, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Program ini didasarkan pada konsep pemberdayaan keluarga melalui pendekatan *bottom-up*, dimana keluarga dianggap sebagai unit terkecil yang memiliki peran aktif dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. PKK melibatkan partisipasi aktif anggota keluarga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan program-program yang ditujukan

Rahayu, Syifa Silvana Puspita. Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut (Xie et al, 2021) kebijakan yang diterapkan meningkatkan pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan pengembangan dan pelatihan. Ini terkait dengan kebijakan kepala desa dengan menetapkan program kesejahteraan masyarakat, program yang dibuat adalah program PKK yang dipimpin oleh perempuan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 bahwa ada 10 program pokok gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang meliputi (1).penghayatan dan pengamalan Pancasila, (2).gotong royong, (3).pangan, (4).sandang, (5).perumahan dan tatalaksana rumah tangga, (6).pendidikan dan keterampilan, (7).kesehatan, (8).pengembangan kehidupan berkoperasi, (9).kelestarian lingkungan, (10).perencanaan sehat. Berdasarkan 10 kategori tersebut, semuanya disusun dan dilaksanakan di setiap kabupaten, kota, kelurahan dan desa. PKK Kelurahan Kahuripan merupakan salah satu PKK terbaik yang ada di Kota Tasikmalaya ini dibuktikan dengan berjalan lancarnya 10 program pokok PKK tersebut.

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi pusat perhatian nasional di Indonesia dari waktu ke waktu, memberdayakan masyarakat ini dilakukan untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan ini dapat dicapai jika masyarakat juga berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial diadakan. Menurut (Citra, 2017) pembangunan berorientasi pada pertumbuhan yang didorong oleh ekonomi dengan sistem terbuka dari sudut pandang konvensional orang atau lingkungan sebagai variabel eksternal. Hal ini sesuai dengan (Sunaryo, 2020) mengatakan bahwasannya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu target sasaran mengembangkan. Maka dengan ini, dibutuhkan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan saling berkesinambungan dalam berbagai bidang. Pada kasus ini memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan tidak hanya potensi ekonomi mereka, tetapi juga martabat, harga diri dan kepercayaan diri, etika dan moralitas terpelihara dengan baik nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Jadi dalam hal ini orang harus bekerja keras untuk kelangsungan hidup mereka.

Salah satu ahli Indonesia yang telah mengemukakan teori tentang kesejahteraan keluarga adalah (Syafiq A. Mughni, 2010). Menurutnya, kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari empat dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi: Kesejahteraan keluarga ditentukan oleh tingkat pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan kemampuan mengelola sumber daya ekonomi secara efektif.
2. Dimensi Kesehatan: Kesejahteraan keluarga mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal ini meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, pola makan yang sehat, kebersihan lingkungan, serta dukungan sosial dan emosional yang memadai.
3. Dimensi Pendidikan: Kesejahteraan keluarga juga terkait dengan akses dan partisipasi dalam pendidikan. Pendidikan yang baik dan berkualitas dapat memberikan keluarga kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi anggota keluarga, sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
4. Dimensi Hubungan Sosial: Kesejahteraan keluarga tercermin dalam kualitas hubungan sosial diantara anggota keluarga, hubungan dengan tetangga, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Hubungan sosial yang positif dan saling mendukung dapat memberikan dukungan emosional, kesejahteraan psikologis, serta akses terhadap jaringan sosial dan sumber daya komunitas.

Dengan memperhatikan keempat dimensi ini, kita dapat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesejahteraan keluarga. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan integratif dalam memahami dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Beberapa ahli di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mengulas

teori PKK. Salah satu pandangan umum adalah bahwa PKK merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan kapasitas keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. PKK bertumpu pada konsep pemberdayaan keluarga melalui pendekatan *bottom-up*, di mana keluarga dianggap sebagai unit terkecil yang memiliki peran aktif dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif anggota keluarga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

PKK Kahuripan menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan kurangnya dana untuk melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, terbatasnya infrastruktur pendukung juga menjadi masalah yang dihadapi oleh PKK Kahuripan. Fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk program-program pemberdayaan perempuan sering kali membutuhkan pemeliharaan dan penggantian yang mahal. Namun, dengan keterbatasan dana, PKK Kahuripan sering kali sulit untuk memperbaharui dan memperbaiki fasilitas tersebut, sehingga berdampak negatif pada kualitas program yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan.

Dampak dari kurangnya dana juga dapat dirasakan dalam pengurangan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK Kahuripan. Program-program yang seharusnya memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan kepada perempuan dalam masyarakat menjadi terbatas dan tidak mampu mencakup semua yang diinginkan. Hal ini berdampak pada partisipasi perempuan yang lebih rendah dan pembatasan akses mereka terhadap peluang pengembangan diri. Untuk mengatasi masalah ini, PKK Kahuripan perlu mencari sumber pendanaan alternatif dan mengelola dana dengan efektif. Upaya ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga donor, mencari dukungan dari sektor swasta, atau menjalankan program penggalangan dana untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan. Selain itu, PKK Kahuripan juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang ada, termasuk pemantauan dan evaluasi yang baik untuk memastikan dana yang tersedia digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Kahuripan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan laporan terperinci dari responden serta mendalami situasi yang dialami. Sumber data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan ketua PKK, Tim Penggerak atau kader PKK Kelurahan Kahuripan baik tingkat RW dan kelurah, serta melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Kahuripan yang merasakan dampak dari program PKK Kelurahan Kahuripan, sementara sumber data sekunder diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan panduan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Implementasi Program PKK di Kelurahan Kahuripan serta faktor penghambat dan pendukung program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKK merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Gagasan mengenai pembentukan PKK bisa dikatakan dimulai pada tahun

1950-an, tepatnya pada tahun 1957 di Bogor. Pada saat itu, di kota hujan tersebut diadakan sebuah seminar yang bertajuk “*Home Economic*”. Gagasan utama dari seminar itu adalah pentingnya menumbuhkan perekonomian di rumah untuk mencapai taraf kesejahteraan. Seminar yang di gelar di Bogor tersebut akhirnya menghasilkan rumusan tentang 10 segi kehidupan dalam keluarga. Pada tahun 1961, melalui kementerian pendidikan, kesepuluh segi kehidupan keluarga tersebut dijadikan sebuah kurikulum pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah (Kurnia, 2019).

Pemberdayaan merupakan proses memberi kuasa kepada yang lemah dan mengurangi kuasa mereka yang terlalu berkuasa untuk mencapai keseimbangan (Mamonto, dkk: 2017). Perempuan tidak hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengasuh anak dan keluarga (Said: 2020). Melalui potensi dan keuletan, perempuan dapat menjadi modal awal dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian, yaitu untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya sendiri. Peran perempuan bukan hanya sebagai mitra hidup maupun pengasuh, tetapi juga berperan dalam menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga (Andalla & Listyani: 2018).

Keberhasilan gerakan PKK di Jawa Tengah yang gawangi oleh Ibu Isriati Moenadi menjadi inspirasi bagi pemerintah, presiden Soeharto pada waktu itu memerintahkan Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Bapak Amir Machmud untuk membentuk PKK dan melaksanakannya di seluruh daerah Nusantara. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Desember 1972 istilah PKK yang sebelumnya kependekan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga diubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Seiring dengan kesuksesan gerakan PKK di seluruh Indonesia, jumlah kader pun kian meningkat. Pada tahun 2000 tim PKK pusat segera menyelenggarakan rakernas luar biasa. Rakernas tersebut diselenggarakan dalam beberapa hari, yaitu mulai dari 31 Oktober sampai dengan 2 November yang diselenggarakan di Bandung. Salah satu keputusan dalam rapat tersebut adalah perubahan istilah, yang mulanya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kendati singkatannya masih sama (PKK). Perubahan ini merupakan penyelenggaraan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan PKK di seluruh wilayah Nusantara. Perubahan bahan istilah ini tertuang dalam surat kawat Mendagri No. SUS.3/6/12 (Kurnia, 2019). Pada tahun 1980, seluruh pergerakan PKK yang semula berada di wilayah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menjadi bagian dari tanggung jawab Departemen Dalam Negeri berdasarkan Kepres No. 28 Tahun 1980. Pada tahun 1982 tim penggerak PKK pusat berdiri. Tujuan dari pendiriannya adalah sebagai wadah informasi dan pelatihan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan PKK.

Seorang ahli di bidang pemberdayaan (Zainab, 2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan melibatkan proses pengembangan potensi, peningkatan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya dan keputusan. Dalam konteks ini, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan masyarakat kemampuan dan kepercayaan diri yang diperlukan agar mereka dapat mengatasi masalah dan mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam konteks pemberdayaan, penting bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Selain itu, pemberdayaan juga memerlukan pendekatan yang *holistic*, yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pemberdayaan dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pemberdayaan,

Rahayu, Syifa Silvana Puspita. Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

individu dan kelompok masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan lokal mereka dan menjadi agen perubahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program PKK di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan PKK yang rutin dilakukan, seperti pengajian, penyuluhan kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, Kelurahan Kahuripan juga memiliki posyandu yang sudah cukup baik dalam menjalankan fungsinya. TP PKK Kelurahan Kahuripan semuanya adalah ibu rumah tangga tidak ada yang bekerja, Tim Penggerak PKK Kahuripan terbilang Tim Penggerak PKK yang sangat aktif jika dibandingkan dengan TP PKK di kelurahan lainnya, TP PKK Kahuripan melaksanakan pertemuan setiap satu bulan sekali dari yang seharusnya setiap tri wulan sekali atau tiga bulan sekali, pada saat dilaksanakan pertemuan TP PKK bukan hanya melaksanakan silaturahmi biasa, tetapi di dalamnya selalu membahas mengenai kinerja program PKK atau saling berbagi informasi yang berkaitan dengan PKK yang didapatkan oleh ketua atau yang mewakili TP PKK Kelurahan ketika melakukan rapat dengan TP PKK Kota atau pusat.

Dalam pelaksanaan program PKK Kelurahan Kahuripan tidak jarang Tim Penggerak PKK atau kader PKK tingkat RW saling bergotong royong baik dalam pengadaan dana yang kurang maupun pengadaan sarana dan prasana yang dapat menunjang terlaksananya program. Hal ini di dukung dengan rasa cinta masyarakat Kelurahan Kahuripan terhadap tempat mereka tinggal, sehingga mereka dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun tenaga demi meningkatkan kesejahteraan hidup dan lingkungan mereka tinggal.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kelurahan Kahuripan selalu bersinergi dengan program pemerintah seperti contohnya kemarin ketika pemerintah sedang menggembor-gemborkan pencegahan *stunting* maka Tim Penggerak PKK Kahuripan juga membina masyarakat dan kader dalam mencegah *stunting* dengan output membuat Gempur Kelabu (Gemar Makan Puding Bolu Rasa Daun Kelor dan Labu Kuning). Gemar Kelabu ini sebelumnya sudah diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada ibu-ibu PKK tingkat RW yang nantinya makanan ini wajib dihidangkan pada saat pelaksanaan Posyandu dan diberikan kepada masyarakat khususnya anak-anak.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan selalu bersinergi dengan program pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah sedang menggencarkan pencegahan *stunting*, TP PKK Kahuripan juga membina masyarakat dan kader dalam mencegah *stunting* dengan membuat Gempur Kelabu (Gemar Makan Puding Bolu Rasa Daun Kelor dan Labu Kuning). Sejauh ini, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan program PKK di Kelurahan Kahuripan. Dukungan yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah membuat TP PKK Kelurahan Kahuripan semakin kompak. Bahkan dalam pelaksanaan programnya, tidak jarang masyarakat dan Tim Penggerak PKK melakukan gotong royong maupun iuran dana guna memperlancar program PKK yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan identifikasi hasil wawancara dengan narasumber penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan lancar hanya saja terkadang keterbatasan dana yang diberikan pemerintah kerap menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan dari berbagai program PKK Kelurahan Kahuripan, ketersediaan dana yang memadai dan layak memang menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan dari PKK. Kelurahan Kahuripan merupakan kelurahan yang paling banyak jumlah penduduknya, bahkan Kelurahan Kahuripan memiliki 19 RW (Rukun Warga) yang pada umumnya satu kelurahan hanya memiliki 5-10 RW saja. Dengan demikian seharusnya pemerataan dana juga menjadi perhatian bagi pemerintah, bahwasannya dengan menyamaratakan dana aparatur daerah itu tidak selalu adil, karena nyatanya semakin banyak

jumlah penduduk di suatu daerah maka keperluan dari daerah tersebut (Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan) semakin banyak juga.

Menurut (Nuriyah Sinta, 2012) mengatakan bahwasannya pemberdayaan perempuan dapat ditingkatkan melalui 10 program PKK yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan dan masyarakat Kelurahan Kahuripan terdapat beberapa kegiatan yang sering dilakukan Tim Penggerak PKK dalam rangka merealisasikan 10 program pokok PKK, diantaranya yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Program ini mencakup kegiatan seperti pembelajaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui penyuluhan, seminar, dan kegiatan kebudayaan. Dalam rangka merealisasikan program Penghayatan dan pengamalan Pancasila Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan selalu mengadakan diskusi untuk membahas nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari serta mengadakan kegiatan keagamaan yang menghormati keberagaman dan toleransi antar umat beragama.
2. Gotong Royong: Program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong untuk membangun dan memperbaiki lingkungan. Untuk meningkatkan kegiatan gotong royong Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan baik tingkat kelurahan atau tingkat RW selalu melakukan kerja bakti bersama warga untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur desa, dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Pangan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan mempromosikan pola makan sehat, pertanian keluarga, dan pengelolaan sumber daya pangan. Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan dalam hal ini memberikan pelatihan mengenai pertanian organik dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran dan buah-buahan, serta membangun kebun keluarga sebagai sumber pangan.
4. Sandang: Program ini berfokus pada upaya peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga melalui produksi dan pemasaran produk sandang. Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan melakukan pelatihan menjahit dan merajut bagi ibu-ibu masyarakat Kelurahan Kahuripan, serta membantu mereka dalam memasarkan produk-produk kerajinan tangannya.
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga: Program ini melibatkan pengembangan perumahan yang layak huni dan peningkatan keterampilan dalam tatalaksana rumah tangga. Dalam program ini Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan bersama dinas terkait melakukan pembangunan rumah sederhana bagi keluarga kurang mampu dan memberikan pelatihan tentang tata cara pengelolaan rumah tangga yang baik dan bersih.
6. Pendidikan dan Keterampilan: Program ini mengedepankan peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi seluruh anggota keluarga.
Contoh nyata: Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan mengadakan kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak, memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, atau keterampilan komputer bagi remaja dan dewasa.
7. Kesehatan: Program ini mengutamakan pencegahan penyakit, peningkatan gizi, dan akses pelayanan kesehatan yang baik bagi keluarga. Pada program kesehatan Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gratis, dan kampanye tentang pentingnya pola hidup sehat dalam keluarga.
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi: Program ini mendorong keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan membentuk kelompok usaha bersama untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk lokal, seperti kerajinan tangan, makanan, atau produk pertanian. Kelompok tersebut dapat bekerja sama dengan koperasi setempat untuk mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan manajemen dan pasar yang lebih luas.

9. Kelestarian Lingkungan: Program ini bertujuan untuk melibatkan keluarga dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan mengadakan kampanye pengurangan penggunaan plastik, penghijauan lingkungan dengan penanaman pohon, pengelolaan sampah dan daur ulang, serta penggunaan energi terbarukan.
10. Perencanaan Sehat: Program ini mengajarkan keluarga tentang perencanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dalam hal ini Tim Penggerak PKK Kelurahan Kahuripan menyediakan informasi dan layanan konseling mengenai berbagai metode kontrasepsi, penyuluhan tentang pentingnya perencanaan keluarga, dan mendukung akses keluarga terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Semua program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, serta menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera, implementasi program-program ini membutuhkan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* terkait guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut (Amartya Sen, 1999) bahwa pembangunan sejati bukan hanya sebatas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan perluasan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ia menyatakan bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan mencapai keadilan sosial. Sen menekankan bahwa memberikan akses yang setara dan kesempatan yang adil kepada perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi akan memberikan manfaat tidak hanya bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pendapat ini sejalan dengan faktor pendorong PKK Kelurahan Kahuripan dalam memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam kelurahan. Dalam menjalankan program-programnya, PKK Kahuripan mengakui bahwa perempuan sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, mereka merasa terdorong untuk menyediakan program-program yang dapat membantu perempuan mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pendapat Amartya Sen memberikan dasar teoritis yang kuat bagi PKK Kahuripan dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan. Melalui pendekatan ini, PKK Kahuripan berusaha meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, dengan harapan dapat mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kelurahan Kahuripan.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang mendorong PKK Kelurahan Kahuripan dalam menjalankan program-programnya. Pertama, kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan menjadi salah satu faktor pendorong utama. PKK Kelurahan Kahuripan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Mereka percaya bahwa melibatkan perempuan secara aktif dan memberdayakan mereka akan membawa manfaat yang signifikan bagi kelurahan dan komunitas secara keseluruhan.

Selain itu, adanya kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam kelurahan juga menjadi faktor pendorong bagi PKK Kahuripan. Mereka menyadari bahwa perempuan sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan memperhatikan kebutuhan ini, PKK Kahuripan merasa terdorong untuk menyediakan program-program yang dapat membantu perempuan mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya, dukungan dari pemerintah dan lembaga lain juga merupakan faktor pendorong yang mempengaruhi PKK Kelurahan Kahuripan. Melalui kebijakan dan program-program yang ada, pemerintah telah memberikan dorongan dan dukungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan. PKK Kahuripan merasa didukung dan terdorong oleh kebijakan-kebijakan ini untuk melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan status dan

peran perempuan dalam masyarakat. Selain itu, peran kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari anggota PKK Kelurahan Kahuripan juga menjadi faktor pendorong. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, anggota PKK Kahuripan bekerja sama dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan. Mereka berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat.

David Korten seorang ahli dalam pembangunan berkelanjutan dan aktivis sosial, mempertanyakan model pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan sosial dan ekonomi. Ia mengkritik sistem yang memberikan keuntungan ekonomi hanya kepada sebagian kecil masyarakat, sementara kelompok yang rentan dan miskin ditinggalkan. Dalam konteks ini, kurangnya alokasi dana yang merata dapat menjadi hambatan bagi upaya pemberdayaan perempuan di Kelurahan Kahuripan dan menghambat pencapaian tujuan program PKK.

(Korten David) 1995 berpendapat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Hal ini termasuk memberikan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua, termasuk perempuan. Kurangnya alokasi dana yang merata dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap program-program pemberdayaan perempuan dan memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi yang ada.

Faktor penghambat yang dialami dalam melaksanakan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Kahuripan adalah kurang meratanya dana yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan program PKK, karena mengingat jumlah kepadatan penduduk Kelurahan Kahuripan sangat tinggi sehingga dana yang diperlukan juga banyak, namun pihak pemerintah tetap memberikan dana sama rata tanpa melihat banyak atau sedikitnya jumlah penduduk di tiap kelurahan, sehingga dengan demikian pada pelaksanaan program PKK di Kelurahan Kahuripan tidak jarang Tim Penggerak atau kader PKK tingkat RW harus mengeluarkan dana dari kantong mereka pribadi untuk keberlangsungan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan terkait program PKK di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, serta menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Melalui program penghayatan Pancasila, gotong royong, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan, dan perencanaan sehat. PKK di Kelurahan Kahuripan berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan PKK di Kelurahan Kahuripan untuk merealisasikan 10 program pokok PKK meliputi mengadakan diskusi dan kegiatan keagamaan yang menghormati keberagaman beragama, kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki infrastruktur desa, pelatihan pertanian organik dan menjahit bagi ibu-ibu, pembangunan rumah sederhana bagi keluarga kurang mampu, kegiatan bimbingan belajar dan keterampilan, penyuluhan kesehatan, pembentukan kelompok usaha bersama, kampanye lingkungan, dan pelayanan konseling tentang perencanaan keluarga berencana.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, implementasi program pokok PKK memerlukan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, meningkatkan komunikasi dan partisipasi, serta menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, program PKK di Kelurahan Kahuripan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Program PKK di Kelurahan Kahuripan telah berjalan lancar, meskipun terdapat kendala keterbatasan dana. Pemerataan dana menjadi faktor penting karena Kelurahan Kahuripan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Meskipun demikian, tim penggerak dan kader PKK tingkat RW saling bekerjasama untuk mengatasi kendala tersebut. Meski demikian, kader PKK tetap aktif dan memperoleh dukungan finansial dari dana kelurahan dan sumbangan masyarakat. Dalam pelaksanaan program PKK Kelurahan Kahuripan tidak jarang Tim Penggerak PKK atau kader PKK tingkat RW saling bergotong royong baik dalam pengadaan dana yang kurang maupun pengadaan sarana dan prasana yang dapat menunjang terlaksananya program. Hal ini di dukung dengan rasa cinta masyarakat Kelurahan Kahuripan terhadap tempat mereka tinggal, sehingga mereka dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun tenaga demi meningkatkan kesejahteraan hidup dan lingkungan mereka tinggal.

DAFTAR RUJUKAN

- Andalla, T., & Listyani, R. H. (2018). Peran Pasangan Keluarga TKI Di Tanah Air dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender Di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Paradigma*, 6(3). Retrieved from: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/26332>.
- Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 31. DOI: <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>
- Korten, David C. (1995). *When Corporations Rule the World*. Berrett-Koehler Publishers.
- Kurnia Rohmat. (2019). *Pedoman Umum PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Mamonto, N., Gosal, T. A. M. R., & Singkoh, F. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Sebagai Pendukung Perekonomian (Studi Di Desa Mooat Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15634>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Mughni, S. A. (2010). *Kesejahteraan Keluarga: Konsep, Dimensi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Nuriyah, Sinta. (2012). *Pemberdayaan Perempuan melalui 10 Program Pokok PKK*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rochmah, Zainab Siti. (2010). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Interdisipliner*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Anchor Books.
- Said, D. H. (2020). Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota. AT-Tawasuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268–290. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>
- Sunaryo, A. (2020). Implementasi Pemberdayaan Pendidikan Melalui 10 Program Pokok PKK. *Journal Public Service and Governance*, 1(2), 253–278. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1565>.
- Xie, H., Wen, J., & Choi, Y. (2021). How the SDGs are implemented in China A comparative study based on the perspective of policy instruments. *Journal of Cleaner Production*, 291, 125937. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125937>